

MASALAH SOSIAL DALAM DUNIA BISNIS DI INDONESIA : SEBUAH PERSPEKTIF AKUNTANSI SOSIAL

Azizul Kholis
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumut

Abstract

The Collapse of Indonesian corporation, to some extent, due to its internal entity environment. The lack of social concern, showed by extent of social disclosure through financial report by entities is a root of the problem. So far the orientation of financial report only to shareholders. To create an effective communication between business and society the role of financial accounting is important. Social Accounting argues that the going concern of a company cannot be separated from society. The paper argues that in Indonesian business needs social reporting to develop social stability and the healthy of economy and investment.

Keywords: *Social problem, Social environment, Social accounting, Social disclosure.*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan sejak tahun 1997 telah mendongkrak bangsa ini pada posisi krisis multi dimensi pada hampir seluruh aspek kehidupan. Khususnya jika dilihat secara lebih rinci pada aspek ekonomi, sendi-sendi perekonomian (Investasi, produksi dan distribusi) lumpuh sehingga menimbulkan kebangkrutan dunia usaha, meningkatnya jumlah korban PHK, tingginya angka pengangguran, menurunnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, dan akhirnya bermuara pada bertambahnya angka-angka jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Dengan tingginya suku bunga diatas enam puluh persen pada puncak krisis saat itu, sangat sulit bagi sektor perbankan untuk menggulirkan kredit, ditambah ketatnya aturan likuiditas disektor perbankan sebagai akibat dari akumulasi kredit macet grup konglomerat dan anak perusahaan dari bank-bank bermasalah mendorong pemerintah melakukan likuidasi, restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan.

Menurut Rizal Ramli, (1998), krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti, sehingga indikator-indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, nilai tukar, indeks harga saham gabungan, dan sebagainya sangat rentan terhadap isu-isu sosial. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial dan aspek politik dapat mengundang sentimen pasar yang bermuara pada instabilitas ekonomi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak sangat buruk bagi peta bisnis dan iklim investasi di Indonesia terutama untuk mendapatkan kepercayaan investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Upaya-upaya pemerintah meyakinkan dunia Internasional akan stabilitas sosial politik dan keamanan belum menunjukkan tanda-tanda yang berarti karena tidak didukung oleh data dan fakta yang sebenarnya, bahkan beberapa investor asing berencana melakukan relokasi bisnis dan investasinya ke negara Asia Tenggara lainnya seperti ke Vietnam, Thailand dan Kamboja yang dianggap lebih kondusif untuk berinvestasi.

Tentunya gambaran ini membuat citra jelek bagi dunia bisnis kita, sehingga investor asing mengalami trauma untuk melakukan investasi di Indonesia. Kemudian dari beberapa contoh kasus pada tabel 1 juga menggambarkan betapa dunia usaha sangat rentan dengan konflik dan berbagai masalah sosial. Maraknya aksi demo buruh, penjarahan gudang, perusakan

gedung kantor dan pabrik, dan penggarapan lahan perusahaan karena masyarakat menyakini tanah ulayat dan hak-hak rakyat yang dirampas oleh

Tabel 1. Contoh permasalahan sosial pada dunia bisnis di Indonesia

No	Contoh kasus	Lokasi	Permasalahan Sosial
01.	PT. Inti Indo Rayon Utama	Porsea Prop . Sumatera Utara	Dihentikan operasional karena adanya masalah lingkungan dan masalah dengan masyarakat sekitar industri
02.	PT. Exxon mobils	Lhokseumawe Aceh utara Prop . DI Aceh	Menghentikan kegiatan produksi karena faktor stabilitas keamanan
03.	PT. Ajinomoto Indonesia	Jakarta	Penarikan distribusi, pemasaran, dan aktifitas produksi karena masalah sertifikasi halal oleh MUI
04.	Beberapa Perusahaan kertas di Riau	Propisi Riau	Mendapatkan protes dari masyarakat setempat sehubungan permasalahan limbah industri dan lingkungan
05.	PT.Maspion Indonesia	Sidoarjo ,Surabaya, Jatim	Permasalahan demo buruh dan isu kesejahteraan karyawan
06.	PT.Telkom Indonesia	Divre IV Jateng dan DIY	Serikat Karyawan (Sekar) PT.Telkom menolak penjualan Divre IV Kepada PT.Indosat
07.	PT. BCA	Jakarta	Serikat Pekerja menolak Divestasi saham BCA
08.	PT.Kereta Api Indonesia	Jakarta	Serikat Pekerja menolak kembalinya Dewan Direksi lama, karena dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia
09.	Bank Internasional Indonesia (BII)	Jakarta	Tuntutan Karyawan atas gaji, upah dan peningkatan kesejahteraan pekerja
10.	PT.Gudang Garam	Kediri Jawa Timur	Mogok Kerja Massal karyawan menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan pekerja.

penguasa pada masa lalu, semakin menguatkan fakta tentang stabilitas sosial yang tidak kondusif dan tentunya bermuara pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, terpuruknya dunia usaha dan iklim investasi yang tidak menentu.

Situasi dan kondisi seperti ini menuntut suatu entitas bisnis untuk mampu mengakses kepentingan lingkungan sosialnya yang diikuti dengan pengungkapan dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

sehingga melahirkan sebuah laporan (output) yang mendeskripsikan segala aspek yang dapat mendukung kelangsungan hidup/*going concern* sebuah entitas. Disinilah peranan akuntansi sebagai bahasa bisnis diharapkan dapat merespons lingkungan sosialnya sebagai perwujudan kepekaan dan kepedulian entitas bisnis terhadap lingkungan sosialnya.

PERAN AKUNTANSI SOSIAL

Beberapa gambaran permasalahan sosial pada dunia bisnis tersebut tentunya menjadi sebuah wacana akademis yang menarik untuk dianalisis dan dicermati, sehingga hasil dari analisis ilmiah tersebut dapat memberikan kontribusi positif sebagai solusi alternatif memecahkan permasalahan sosial di suatu entitas bisnis. Setidaknya perusahaan sebagai organisasi bisnis harus mampu merespon apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya, sehingga entitas bisnis dan entitas sosial dapat berinteraksi dan berkomunikasi untuk kepentingan bersama. Komunikasi tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan kearah transparansi dan akuntabilitas sosial yang diterjemahkan melalui akuntansi sosial.

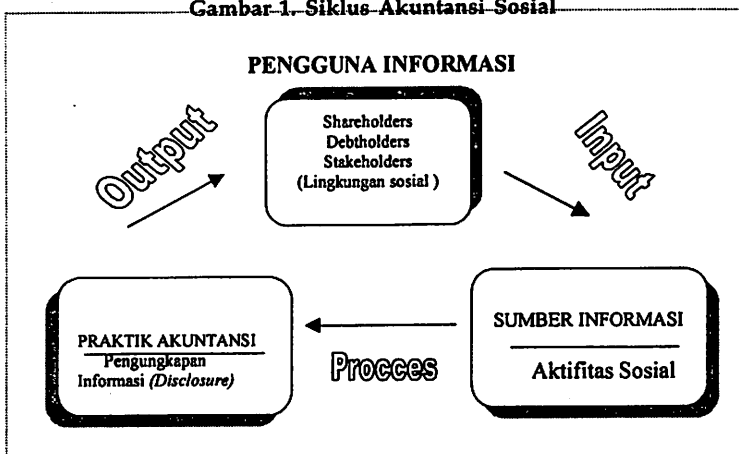
Teori akuntansi sosial mensyaratkan suatu pernyataan tujuan, serangkaian konsep sosial dan metode pengukurannya, struktur pelaporan dan komunikasi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hendriksen, 1994). Pernyataan tersebut memberikan gambaran tentang hubungan mendasar antara konsep akuntansi sosial dengan informasi yang dihasilkan, sehingga secara kongkrit informasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Adapun tujuan akuntansi sosial adalah untuk memberikan informasi yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat di evaluasi (Hendriksen, 1994), dengan demikian penekanan akuntansi sosial tertuju pada kemampuan akuntansi merespons lingkungan sosialnya untuk kepentingan *Stake holders* lainnya pada manajemen perusahaan, bukan semata-mata hanya kepentingan *Shareholders* atau *Debt holders* saja. Keberadaan Akuntansi sosial ini memungkinkan bahwa biaya operasi perusahaan tidak sama dengan biaya sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat secara keseluruhan karena adanya unsur-unsur *externalities* (Muhammad, 2000).

Jika pos-pos biaya sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat dapat menunjang operasi dalam konteks sosial tentunya dapat menunjang *going concern* suatu entitas, dan disinilah kunci utama yang dibutuhkan bagi para investor selain dari faktor-faktor fundamental entitas bisnis tersebut. Sehingga akuntansi sosial dapat berperan dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa bisnis yang mengakomodir masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan.

Permasalahan-permasalahan sosial pada suatu entitas memang bukan menjadi target utama, karena banyak faktor-faktor lain seperti investasi, permodalan, produksi, pemasaran yang berkaitan langsung dengan aktifitas normal sebuah entitas yang menjadi fokus utama. Setelah itu, perusahaan harus melihat lingkungan sosialnya antara lain masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak lain yang dapat menjadi pendukung jalannya operasional. Untuk mendapatkan gambaran ini perusahaan harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, setelah itu untuk menindak lanjuti dan mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara periodikal, sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak (Shareholders, stakeholders, debtholders). Secara sederhana siklus Akuntansi sosial dapat digambarkan pada Gambar 1.

Uraian dari Gambar 1 tersebut secara ringkas adalah bahwa akuntansi sosial dilaksanakan atas dasar aktifitas sosial yang dijalankan oleh suatu entitas bisnis, selanjutnya diproses berdasarkan prinsip, metode dan konsep akuntansi

Gambar 1. Siklus Akuntansi Sosial



untuk diungkapkan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, kemudian dari informasi yang dihasilkan pengguna informasi akan dapat menentukan kebijakan selanjutnya untuk aktifitas sosial dan kebijakan untuk lingkungan sosial entitas bisnis yang dijalankan.

Kemudian jika permasalahan akuntansi sosial ini dikaitkan dengan prinsip dasar *good corporate governance*, khususnya pada prinsip Responsibility yang berbicara tentang bagaimana entitas bisnis bertanggung jawab kepada *stakeholders* dan juga lingkungan. Satyo (2001) menulis bahwa prinsip dasar *good corporate governance* (pengelolaan yang baik), ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah semata tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum, konsumen, serikat pekerja dan karyawan perusahaan secara individu.

Saat ini tuntutan pengelolaan perusahaan dengan baik (*Good Corporate Governance*) juga telah menjadi isu global, dimana perusahaan-perusahaan multinasional selalu berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga perusahaan tidak hanya mementingkan motif bisnisnya saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat.

PENGUNGKAPAN SOSIAL (SOCIAL DISCLOSURE) PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN

Pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan telah dilakukan dinegara negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia. Secara khusus di Amerika Serikat, pengungkapan informasi sosial hanya bersifat kerelaan (*Voluntary disclosure*) bukan merupakan suatu kewajiban (*Mandatory disclosure*), tetapi kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan mengungkapkan aktifitas sosial tersebut untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang kiprah suatu perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Keadaan ini turut mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan secara sukarela untuk setiap periode mengenai lingkungan sosialnya, sehingga dapat menunjukkan kepada kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tahunan perusahaan yang dapat menjelaskan kepedulian dan kepekaan sosial suatu

entitas bisnis.

Praktik pengungkapan sosial bagi perusahaan di Indonesia yang ingin mengungkapkan lingkungan sosialnya dapat berpedoman kepada standar yang telah dikeluarkan dan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dimana secara implisit telah mengakomodasi hal tersebut. Sebagaimana tertulis pada Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) no 1 (Revisi 1998). Paragraf 9 yang berbunyi sebagai berikut :

" Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor - faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Menurut Kiswara (2001), dalam hal penerapan standar-standar pelaporan, Ikatan Akuntan Indonesia mengacu kepada standar yang diterapkan di Amerika Serikat, hal ini mengingat IAI berada pada posisi yang relatif cukup *transferable*, mengingat tinggal mengadopsi rancangan kebijakan akuntansi yang berkembang di Amerika Serikat dan dunia Internasional. Hal tersebut cukup layak diterapkan, karena dinamika perekonomian Indonesia mengacu pada trend dunia khususnya Amerika Serikat. Namun kondisi tersebut tentunya harus disertai dengan penataan kebijakan yang kondisional.

Untuk melihat lebih jauh praktik pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia, para peneliti akuntansi telah melakukan berbagai penelitian mengenai hal ini dan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2000), mengenai praktik pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan terhadap 81 perusahaan publik (listing di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya direktori 1998) yang menjalankan bisnis di Indonesia. Hasil riset tersebut menemukan bahwa perusahaan lebih banyak mengungkapkan tema ketenagakerjaan (29,87%) dibandingkan tema produk dan konsumen (20,74%) dan tema kemasyarakatan (13,21%). Henny dan Murtanto (2001) dalam penelitiannya menemukan hal yang sama mengenai praktek pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ. Kedua peneliti juga menambahkan tema pengungkapan sosial. Untuk mengetahui lebih terperinci informasi sosial yang dapat diungkapkan dalam

laporan tahunan perusahaan di Indonesia diuraikan pada tabel 2, tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 2. Pengungkapan Sosial Tema Masyarakat

No	Item pengungkapan aspek sosial
01	Dukungan pada kegiatan sosial budaya (pameran, pagelaran seni, dsb)
02	Dukungan pada kegiatan olahraga (termasuk sponsorship)
03	Dukungan pada dunia anak (pendidikan)
04	Partisipasi pada kegiatan sekitar kantor atau pabrik (perayaan Hari besar)
05	Dukungan ke Lembaga kerohanian (Dewa Masjid, Bazis, dsb)
06	Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan magang dan kesempatan penelitian)
07	Dukungan ke lembaga sosial lainnya
08	Fasilitas sosial dan fasilitas umum
09	Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwirausaha bagi masyarakat sekitar industri)

Tabel 3. Pengungkapan Sosial Tema Konsumen

No	Item pengungkapan aspek Sosial
01	Mutu, kualitas produk
02	Penghargaan kualitas (termasuk sertifikasi kualitas, sertifikasi halal, penghargaan, dsb)
03	<i>Costumer Satisfaction</i> (upaya – upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen)
04	Masalah komputer (MKT) 2000/Y2K
06	Iklan yang terlalu mengeksploitasi konsumen
07	Spesifikasi produk, umur produk, aspek masa berlaku dsb

Penelitian- penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia relatif masih sangat rendah, dan diduga perusahaan tidak memanfaatkan laporan tahunan sebagai media komunikasi antara perusahaan dan *Stakeholders* lainnya. Kemungkinan perusahaan hanya memanfaatkan laporan tahunan sebagai laporan kepada

Tabel 4. Pengungkapan Sosial Tema Tenaga Kerja

No	Item pengungkapan aspek Sosial
01	Jumlah tenaga kerja
02	Keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas keselamatan kerja)
03	Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan)
04	Koperasi karyawan
05	Gaji / upah
06	Tunjangan dan kesejahteraan lain (termasuk UMR , bantuan masa krisis untuk keluarga karyawan, asuransi dan fasilitas transportasi)
07	Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi)
08	Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan karir
09	Fasilitas peribadatan (termasuk fasilitas peribadatan dan peringatan hari besar agama)
10	Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita)
11	Pensiun (termasuk pembentukan atau pemilihan yayasan dana pensiun)
13	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Serikat Pekerja
14	Turnover pekerja (termasuk pengurangan kerja dan rekrutmen)

Shareholders dan Debtholders atau sebagai informasi bagi calon investor (Utomo,2000). Padahal sebenarnya ada dua aspek atau faktor yang sering dijadikan bahan analisis oleh para Investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Kedua faktor tersebut adalah faktor teknis dan faktor fundamental (Prabowo,2000). Untuk lebih jelasnya perbedaan kedua faktor diatas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Faktor Teknis dan Faktor Fundamental

Contoh faktor Teknis	Contoh faktor Fundamental
Faktor Regional misalnya penurunan suku bunga <i>Federal Reserve</i>	Terbitnya Laporan Keuangan Perusahaan
Faktor politik misalnya penanganan kasus pengadilan yang melibatkan tokoh publik	Rapat Umum Pemegang Saham
Faktor sosial budaya misalnya Kongres Papua Merdeka dan	Manajemen
Faktor keamanan misalnya huru hara	Kinerja

Berbeda dengan di Indonesia, penelitian-penelitian yang dilakukan diluar negeri menunjukkan bahwa di Inggris Ince dan Davut (1997), Tsang dan Eric WK (1998) di Singapura, Hackson dan Milne (1996) di Selandia Baru, Adam et.al (1997) di enam negara Eropa (Prancis, Jerman, Swiss, Inggris, dan Belanda) dan penelitian Andrew et.al (1989) di Malaysia dan Singapura membuktikan pengungkapan sosial perusahaan sudah menjadi hal yang lazim dilaksanakan dengan penekanan bahwa perusahaan besar lebih banyak mengungkap informasi sosialnya dibandingkan dengan perusahaan kecil.

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan bahwa dunia usaha di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah sosial, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada iklim investasi dan pemulihan perekonomian Indonesia. Perlunya informasi lengkap yang dibutuhkan oleh Investor untuk mengetahui masalah sosial yang berkenaan langsung dengan lingkungan sosial suatu entitas bisnis dapat menjadi pertimbangan bagi Investor untuk mendeteksi secara langsung stabilitas lingkungan sosial dan tingkat resiko atas investasi yang akan dilaksanakan.

Akuntansi sosial sebagai bahasa bisnis dapat mengkomunikasikan hubungan antara entitas bisnis dengan entitas sosial melalui pengungkapan sosial (*social Disclosure*) perusahaan secara periodik, sehingga dapat menjembatani dan meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial yang muncul pada dunia usaha (entitas bisnis) di Indonesia.

Pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan juga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi *regulator body* (Penyusun kebijakan, seperti BAPEPAM, BI, Depkeu) sehingga stabilitas sosial dunia bisnis dapat diciptakan dengan menyusun suatu kebijakan-kebijakan yang lebih memfokuskan kepada aspirasi dan kepentingan *stakeholder*. (masyarakat, konsumen, serikat pekerja).

Untuk dapat menciptakan suatu kondisi stabilitas sosial dari lingkungan sosial suatu entitas bisnis, diperlukan kepedulian dan kepekaan suatu entitas bisnis terhadap permasalahan sosial yang turut mendukung survival dan

going concern dalam jangka panjang. Tentunya hal ini secara otomatis akan mendorong dunia usaha kita kepada iklim investasi yang lebih baik dan stabilitas dunia usaha yang memiliki ketahanan yang tangguh dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan hendaknya bukanlah merupakan pengungkapan secara sukarela (Voluntary disclosure), tetapi dapat dipikirkan untuk menjadi suatu keharusan (Mandatory disclosure). Selanjutnya implementasi dari pengungkapan sosial bagi setiap entitas pelaku bisnis di Indonesia diharapkan mampu menciptakan informasi yang bermanfaat, sehingga entitas bisnis tidak rentan terhadap masalah-masalah diluar perekonomian (misal sosial, politik), dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat membedakan muatan bisnis dengan muatan non bisnis. Disinilah terlihat bahwa peran Akuntansi sosial diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dunia bisnis usaha yang peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Carol, A, et.al. 1997. *Coorporate Social Reporting Practices in Western Europe :Legitimizing Corporate behavior*, Working Paper, Departement of Accounting and Finance, University of Glasglow, England.
- Adrew, BH. FA. Gaul, et.al, 1989. *A Note of Corporate Social Disclosure Practise in Developing Cotries : The Cases of Malaysia and Singapore*, British Accounting Review, Vol.21 pp. 371-376.
- Hackston, David and Markus J. Milne, 1996. Some Determinant of Social and Enviromental Disclosures in New Zealand Companies, *Accounting, Auditing ad Accountability Journal*, Vol.9. No 1 pp.77-108.
- Hendriksen Eldon.S, 1994, *Accounting Theory*, Third Edition, Mc.Hill, USA.
- Henny dan Murtanto, 2001, *Praktek Pengungkapan Sosial pada Laproan Tahunan Perusahaan di Indonesia*, MRAAI, Vol. 1 No.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 1999, *Standar Akuntansi Keuangan*, buku satu,

Salemba empat diterbitkan untuk IAI, Jakarta.

- Ince, Davult. 1997. *Determinant of Social and Environmental Discolusre of UK Company, paper , Interdiciplinary Perspective o Accounting Conference*, Manchester, England.
- Kiswara, Endang , 2001, *Akuntansi Keuangan* , handout panduan materi kuliah Magister Akuntansi Universitas Diponegoro , Semarang.
- Koetin, E. A.1994, *Suatu Pedoman Investasi dalam Efek di Indonesia*,edisi pertama, Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia ,Jakarta.
- Muhamad, 2000, *Prinsip – prinsip Akuntansi dalam Al-qur'an* , cetakan kedua, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Nasution, Anwar,1999, *Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia*, makalah, disampaikan Pada seminar nasional sehari ISEI cabang Medan, Medan
- Prabowo, Tommy, 2000, *Faktor Teknis Versus Faktor Fundamental*, hasil liputan, Media Akuntansi, edisi 10/ Juli/ tahun VII, Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta.
- Satyo,2001, *Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan*, artikel, Media Akuntansi, edisi 17/ April-Mei, Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta.
- Tsang, Eric, WK. 1998. *A Longitudinal Study of Corporate Social Reporting in Singapore : The Cases of Banking, Food and Beverages and Hotel Industries*, Accounting, Auditing and Accountability journal, Vol.11 No 5,pp. 624-635.
- Utomo, Muslim Muhammad, 2000, *Praktek pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia*, Lapora penelitian, Simposium Nasional Akuntansi III, IAI Kompertemen Akuntan Pendidik, Jakarta.